DAFTAR ISI

Halaman

MOTO..... ii
LEMBAR PENGESAHAN..... iii
LEMBAR PERNYATAAN..... v
ABSTRAK..... vi
ABSTRACT..... vii
KATA PENGANTAR..... viii
DAFTAR ISI..... x
DAFTAR TABEL..... xiv
DAFTAR GAMBAR..... xv
DAFTAR LAMPIRAN..... xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah..... 1
1.2 Rumusan Masalah..... 6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian..... 6
1.4 Kegunaan Penelitian..... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka..... 9
2.1.1 Pengertian Implementasi..... 9
2.1.2 PengertianKebijakan..... 11
2.1.3 Pengertian Implementasi Kebijakan..... 14
2.1.4 Model Implementasi Kebijakan..... 18
2.1.5 Perspektif Implementasi Kebijakan..... 25
2.1.6 Unsur-unsur Implementasi Kebijakan..... 29
2.1.7 Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan..... 31
2.2 Kerangka Pemikiran..... 36

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian..... 48

3.1.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Barat..... 48
3.1.2 Profil BPPT Provinsi Jawa Barat 50
3.1.3 Personil BPPT Provinsi Jawa Barat 51
3.1.4 Gambaran Umum Surat Keputusan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) di BPPT Provinsi Jawa Barat 58
3.1 Metode Penelitian..... 65
3.1.5 Desain Penelitian..... 65
3.1.6 Teknik Pengumpulan Data..... 66
3.1.7 Teknik Penentuan Informan 68
3.1.8 Teknik Analisa Data 69
3.1.9 Lokasi dan Waktu Penelitian..... 71
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Tentang Pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP Pada BPPT Provinsi Jawa Barat 73
4.1.1 Transformasi Dalam Implementasi Kebijakan Tentang Pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat..... 75
4.1.2 Kejelasan Informasi Dalam Implementasi Kebijakan Tentang Pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat..... 80
4.1.3 Konsistensi Dalam Implementasi Kebijakan Tentang Pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat..... 85
4.2 Sumber Daya Implementasi Kebijakan Tentang Pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP Pada BPPT Provinsi Jawa Barat..... 89
4.2.1 Sumber Daya Manusia Dalam Implementasi Kebijakan Tentang Pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP Pada BPPT Provinsi Jawa Barat 92

4.2.2 Sumber Daya Informasi Dalam Implementasi Kebijakan Tentang Pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP Pada BPPT Provinsi Jawa Barat 96
4.2.3 Sumber Daya Anggaran Dalam Implementasi Kebijakan Tentang Pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP Pada BPPT Provinsi Jawa Barat 99
4.2.4 Sumber Daya Fasilitas Dalam Implementasi Kebijakan Tentang Pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP Pada BPPT Provinsi Jawa Barat 104
4.3 Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan Tentang Pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP Pada BPPT Provinsi Jawa Barat 110
4.3.1 Staffing Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan Tentang Pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP Pada BPPT Provinsi Jawa Barat 112
4.3.2 Kewenangan Aparatur Dalam Implementasi Kebijakan Tentang Pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP Pada BPPT Provinsi Jawa Barat 117
4.4 Struktur Birokrasi Implementasi Kebijakan Tentang Pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP Pada BPPT Provinsi Jawa Barat 122
4.4.1 *Standard Operating Prosedures* (SOP) Dalam Implementasi Kebijakan Tentang Pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP Pada BPPT Provinsi Jawa Barat..... .. 125
4.4.2 Fragmentasi Dalam Implementasi Kebijakan Tentang Pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP Pada BPPT Provinsi Jawa Barat 131

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan..... 136
5.2 Saran..... 138

DAFTAR PUSTAKA 140
LAMPIRAN-LAMPIRAN 142

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Jumlah Staf BPPT Provinsi Jawa Barat..... 51
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian 72

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 *Direct and Indirect Impacts On Implementation* 16
Gambar 2.2 *Implementasion as a politicaand Administrative Process* 19
Gambar 2.2 Model Linear Implementasi Kebijakan..... 20
Gambar 2.3 Model Interaktif Implementasi Kebijakan 21
Gambar 2.4 Model Kesesuaian 24
Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran..... 47
Gambar 3.1 Struktur Birokrasi BPPT Provinsi Jawa Barat 52
Gambar 4.1 Mekanisme Perijinan BPPT Provinsi Jawa Barat 130

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Aparatur 142
Lampiran 2 Pedoman Wawancara Masyarakat 145
Lampiran 3 Transkrip Wawancara 147
Lampiran 4 Daftar Informan 151
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian 153
Lampiran 6 Surat Ijin Penelitian 155
Lampiran 7 Surat Telah Selesai Penelitian 157
Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup 158